

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Munib, 2011, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Unnes Press, Semarang.
- Amin, Samsul Munir, 2010, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Amzah, Jakarta.
- Arifin, 1997, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan di Sekolah dan Luar Sekolah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewanta, M. F. N. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djamil, M. N., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Jalaludin dan Ramayulis, 1993, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Joesoef, Soelaman, 1992, *Konsep Dasar Pendidikan Nonformal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Mustofa, Bisri, 2015, *Psikologi Pendidikan: Pendekatan, Orientasi dan Perspektif Baru Sebagai Landasan Pengembangan Strategi dan Proses Pembelajaran (Teori dan Praktik)*, Parama Ilmu, Yogyakarta.
- Nazir, Moh., 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primahasya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prinst, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, 1972, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, Bismar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Hengki Liklikuwata, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, R. H., 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.
- Suwarno, 1985, *Pengantar Umum Pendidikan*, Aksara Baru, Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wiyono, R. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Audrian, Dwina Arif, “Implementasi Lembaga Penempatan Anak Sementara di Provinsi Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No.3, Mei 2018.

Lumowa, Hizkia Brayen, “Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, Januari 2017.

Mumbunan, Michael H., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur”, *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 4, Agustus 2013.

Tim Kerja Pengkajian Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Tim Kerja Pengkajian Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Widari, Tatik Mei, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak” *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 15, Februari 2012.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Amrita, Laksmi, 2017, *Pelaksanaan Pidana Anak Berupa Pemidanaan Dalam Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Tujuan Pemidanaan Bagi Anak*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Mubarok, Zaky, 2018, *Pemenuhan Hak Pendidikan dan Kesehatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nabila, Aryani Farah, 2017, *Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Salemba (Lapas Salemba)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Novita, Icha Fatma, 2016, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Remaja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purba, Ratna, 2016, *Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak (Studi Kasus: Lapas Klas IIA Salemba)*, Tesis, Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Raharjo, Afandi Haris, 2014, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.
- Wasiat, Safira Hanny Rizky, 2018, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Yogyakarta*.

D. Internet

Aminah, Andi Nur, “Disdikpora DIY Siapkan Pendidikan Bagi Siswa yang Dipenjara”, <https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/16/12/19/oifsqx-disdikpora-diy-siapkan-pendidikan-bagi-siswa-yang-dipenjara>, diakses 21 Desember 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)”, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>, diakses 28 Februari 2019.

Bernie, Mohammad, “Bagaimana Hak Pendidikan Anak yang Terjerat Kasus Hukum?”, <https://tirto.id/bagaimana-hak-pendidikan-anak-yang-terjerat-kasus-hukum-cLvJ>, diakses 20 Desember 2018.

Institute For Criminal Justice Reform, 2017, “Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan”, <http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses 19 Februari 2019.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, “Berita Satuan Kerja Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Lapas Balikpapan”, <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-satuan-kerja/2329-peresmian-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-dan-lembaga-penempatan-anak-sementara-lpas-di-lapas-balikpapan>, diakses 23 Januari 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembinaan Pendidikan Nasional”, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembinaan-pendidikan-nasional>, diakses 29 Januari 2019.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Bimbingan Mental”, <https://www.kemsos.go.id/content/bimbingan-mental>, diakses 3 Februari 2019.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Bimbingan Keterampilan Kerja”, <https://www.kemsos.go.id/content/bimbingan-keterampilan-kerja>, diakses 5 Februari 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 102).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 56).

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).

United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.